KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua

Kementerian PPN/
Bappenas

MASTER PLAN INDUSTRI HALAL INDONESIA

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua

Kementerian PPN/
Bappenas

MASTER PLAN
INDUSTRI HALAL INDONESIA
2023-2029

EXECUTIVE SUMMARY

“Perkembangan industri halal adalah salah satu jawaban atas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan paradigma baru industrialisasi di Indonesia saat ini dan mendatang.”

Perkembangan ekonomi syariah dan *halal lifestyle* mulai dilirik oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu unsur penting untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, guna menopang perekonomian yang berkelanjutan. Potensi pertumbuhan yang tinggi ini dapat dilihat dari data *State of the Global Islamic Economy Report (SGIER)* 2022 yang memperlihatkan bahwa pengeluaran muslim secara global pada tahun 2022 akan tumbuh hingga 9,1% untuk sektor-sektor ekonomi syariah (tidak termasuk sektor keuangan syariah)

Kemudian, di tahun 2025 diperkirakan belanja muslim mencapai USD 2,8 triliun dengan tingkat *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) dalam empat tahun sebesar 7,5%.

Di samping itu, jumlah penduduk muslim di Indonesia tercatat sebanyak 241,7 juta jiwa per Desember 2022 (berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri), atau setara dengan 89,02% dari populasi tanah air sebanyak 277,75 juta jiwa pada akhir tahun 2022. Ini tentunya merupakan potensi pertumbuhan yang sangat besar untuk ekonomi syariah dan industri halal.

Negara Muslim Terbesar
di Dunia

241,7 Juta
Penduduk Muslim di Indonesia

89,02%
Penduduk Muslim
dari Populasi Indonesia

**data Kementerian Dalam Negeri per Desember 2022*

Masyarakat Indonesia saat ini berada pada kategori *middle class income* atau kelas berpendapatan menengah, tentunya menjadi salah satu ceruk pasar besar di dalam negeri bagi pengembangan industri halal nasional. Berdasarkan *Indonesia Halal Market Report* (IHMR) 2021/2022, Indonesia berpeluang menambah USD 5,1 miliar atau IDR 72,9 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor yang termasuk pada industri halal.

Industri pengolahan penting menjadi salah satu penggerak utama dalam perekonomian nasional, karena sektor ini berfokus pada peningkatan nilai tambah produk, sehingga mampu menaikkan kontribusi PDB. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa sektor pengolahan atau manufaktur ini berkontribusi terhadap PDB nasional di tahun 2022, yaitu sebesar 17,88%. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2022), dua kontributor teratas dari sektor industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman (6,23%), serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,74%).

Berdasarkan survei KNKS dalam kajian Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal (2019), kehalalan merupakan hal yang sangat penting bagi produsen dalam menghasilkan produk untuk masyarakat. Oleh karena itu industri pengolahan perlu memperhatikan proses pada saat pengadaan bahan, mendesain produk, memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan produk. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, **produk halal dihasilkan melalui proses produk halal, yaitu rangkaian kegiatan (proses) untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.**

Sebagai bagian penting dalam industri halal, sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2019 memberikan kontribusi 4,9% pada perekonomian nasional. Walau di masa pandemi Covid-19 tahun 2020, pariwisata global merupakan sektor yang paling terdampak, namun pariwisata di Indonesia masih berkontribusi sebesar 2,2% terhadap perekonomian nasional atau senilai IDR 346 triliun, serta mampu menyerap sejumlah 21,3 juta tenaga kerja atau setara dengan 16,2% kontribusi terhadap tenaga kerja nasional di tahun 2020.

Sementara itu bidang industri halal lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif pulih lebih cepat setelah di awal pandemi mengalami perlambatan sebesar -2,4% pada tahun 2020, kemudian tumbuh sebesar 2,9% pada tahun 2021. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), PDB ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 7,0% terhadap ekonomi nasional pada tahun 2021 atau senilai IDR 1.191 triliun. Sektor ini mampu menyerap sejumlah 21,9 juta tenaga kerja atau setara dengan 16,7% kontribusi terhadap tenaga kerja nasional di tahun 2021.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, pengembangan industri halal adalah salah satu jawaban atas persoalan pencarian potensi ekonomi baru yang berkelanjutan dalam pengembangan industrialisasi di Indonesia saat ini. Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang/jasa halal dengan keterlibatan penggunaan sumber daya bahan baku, sarana peralatan, dan proses pengolahan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk menghasilkan produk halal, termasuk juga rantai nilai yang terkait dengan kegiatan industri tersebut, di antaranya *halal lifestyle* konsumen yang sehat, yang baik, dan berkelanjutan. *State of the Global Islamic Economy Report (SGIER)* 2022 melaporkan bahwa ada beberapa sektor unggulan yang menjadi penopang industri halal global, di antaranya sektor makanan dan minuman halal, sektor farmasi dan kosmetik halal, sektor pariwisata ramah muslim, dan sektor *modest fashion*. Di samping itu, terdapat juga media dan rekreasi dengan *halal lifestyle,* yang lebih dikenal sebagai bagian sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

"Arah dan tujuan *Master Plan* Industri Halal Indonesia (MPIHI) adalah menyelaraskan amanat rencana pembangunan nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dari waktu ke waktu, pengembangan industri halal di Indonesia akan diselaraskan dengan program Kementerian/Lembaga terkait pengembangan industri halal."

Dalam rangka mengembangkan industri halal untuk mencapai visi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka diperlukan *Master Plan* Industri Halal Indonesia (MPIHI). Arah dan tujuan MPIHI ini menyelaraskan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, MPIHI juga sejalan dan merupakan pendalaman dari strategi pengembangan industri halal pada *Masterplan* Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, yang bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dari waktu ke waktu, pengembangan industri halal di Indonesia akan diselaraskan dengan program Kementerian/Lembaga terkait pengembangan industri halal, yang tertuang pada Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP).

MPIHI 2023-2029 mengusung *tagline* "Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan", sesuai dengan perkembangan kondisi dunia dan arah transformasi ekonomi Indonesia, sebagai bagian dari partisipasi global untuk masa depan.

"... 4 strategi utama, 11 program utama, dan 8 indikator menjadi instrumen di dalam MPIHI untuk mencapai target yang diharapkan."

Pelaksanaan MPIHI digambarkan melalui *road map* pengembangan industri halal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. *Road map* pengembangan industri halal yang disusun bertujuan sebagai panduan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam mencapai visi "Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia" dengan 4 (empat) strategi utama, 11 (sebelas) program utama dan 8 (delapan) indikator yang akan dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Adapun strategi dan program utama dalam pengembangan industri halal adalah sebagai berikut:

(1) **Peningkatan produktivitas dan daya saing,** melalui 4 program utama, yaitu (i) Penguatan rantai nilai halal; (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing; (iii) Penguatan pelaku industri halal yang mencakup Industri/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (I/UMKM) dan pesantren, serta penguatan inkubasi *startup* bisnis halal berbasis inovasi dan teknologi; dan (iv) Peningkatan riset dan inovasi.

(2) **Penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi,** terdiri dari dua program utama, yaitu (i) Penguatan industri halal melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang memiliki kecukupan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan; dan (ii) Penerapan sistem jaminan produk halal (sertifikasi dan *traceability)*.

(3) **Penguatan keuangan dan infrastruktur,** mempunyai tiga program utama, yaitu (i) Dukungan keuangan syariah yang inklusif; (ii) Penguatan infrastruktur industri halal; dan (iii) Penyusunan indikator dan *database* industri halal oleh otorita data nasional.

(4) **Penguatan *halal brand and awareness,*** meliputi dua program utama, yaitu (i) Peningkatan preferensi sosial dan *halal lifestyle* melalui promosi dan edukasi; dan (ii) Terjalinnya hubungan diplomasi ekonomi internasional dalam bidang industri halal.

Melalui strategi dan program utama di atas, maka target pencapaian yang terdapat pada MPIHI ini adalah sebagai berikut: (i) **meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi;** (ii) **meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor;** (iii) **menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;** (iv) **menguatnya kewirausahaan dan I/UMKM;** (v) **menguatnya *halal brand and awareness*.**

***Milestones* Pengembangan Industri Halal di Indonesia**

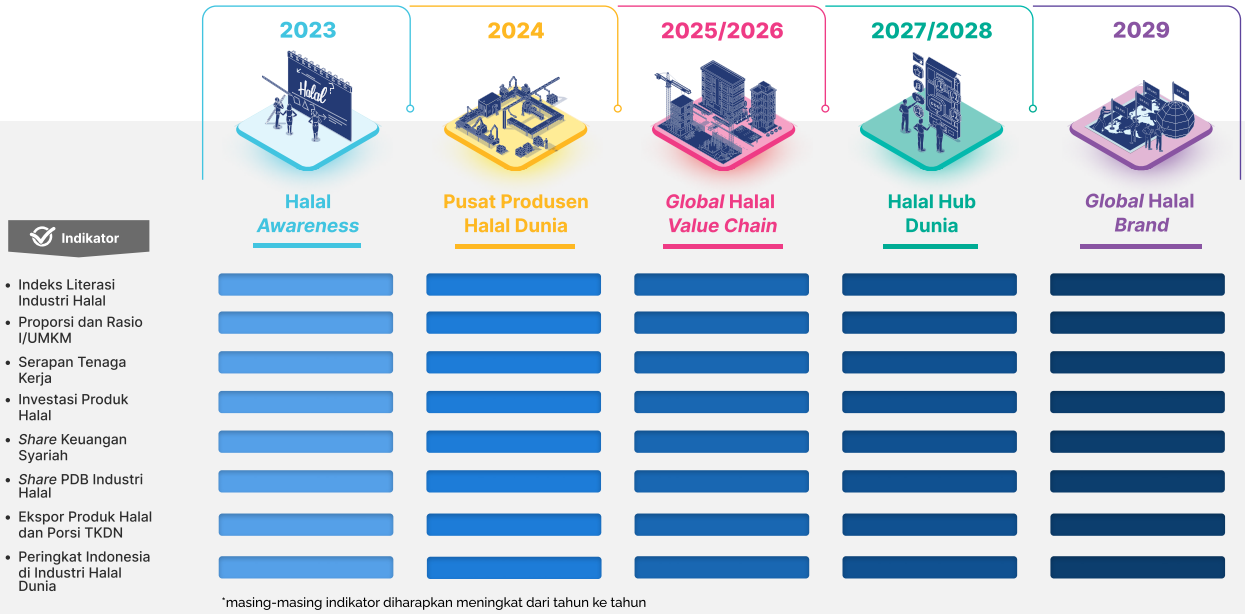

Sumber : Kajian Roadmap Industri Halal (dimodifikasi), Bank Indonesia

Kerangka *Master Plan* Industri Halal Indonesia

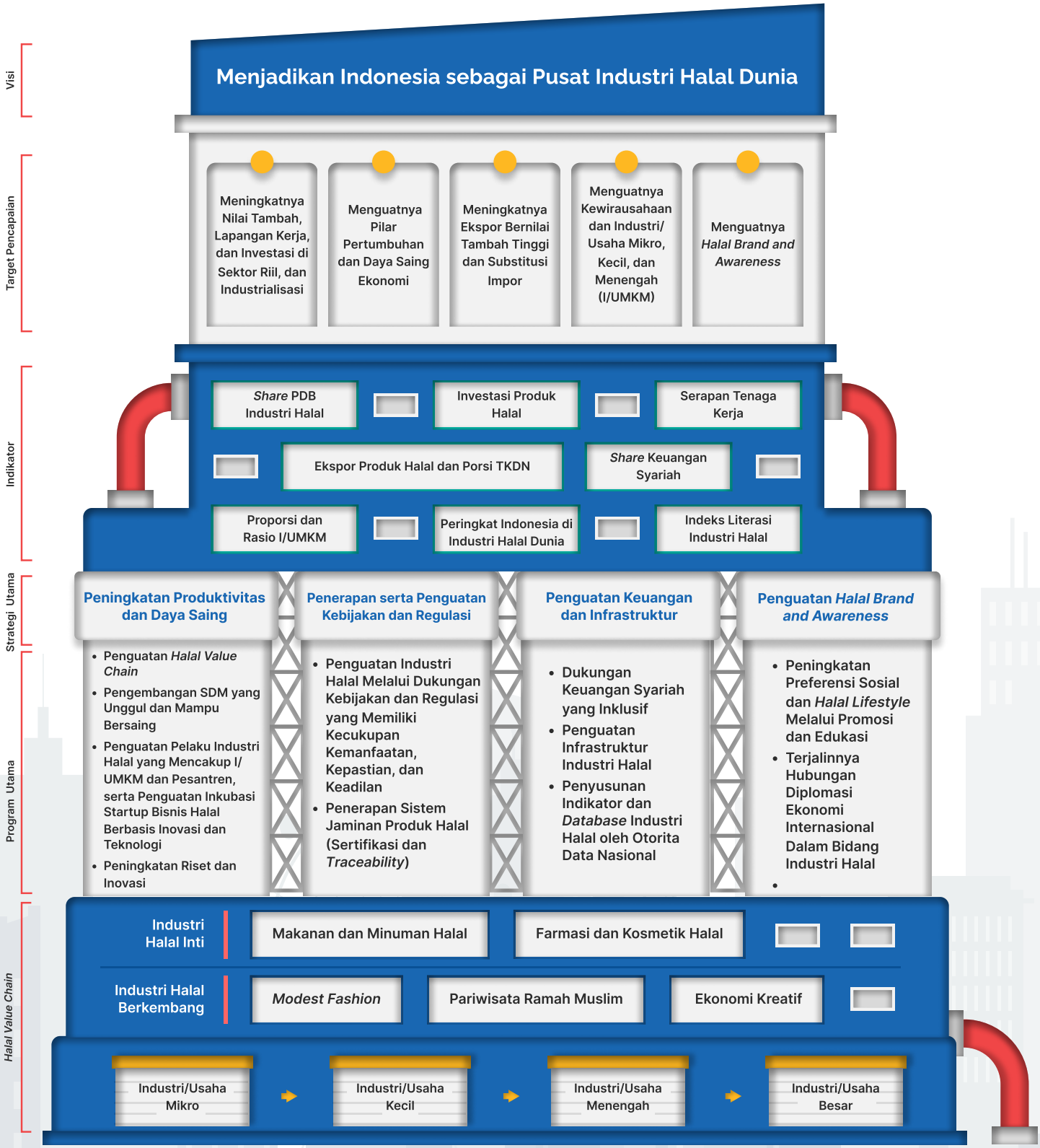

Gambar 1. Kerangka *Master Plan* Industri Halal Indonesia dengan Visi "Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia"
Sumber : Kajian Roadmap Industri Halal (dimodifikasi), Bank Indonesia

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, terdapat **lima target pencapaian pada MPIHI ini yaitu:**

a) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;

b) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;

c) Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor;

d) Menguatnya kewirausahaan dan industri/usaha mikro, kecil dan menengah (I/UMKM); dan

e) Menguatnya *halal brand and awareness*.

Keterkaitan antara target pencapaian dengan strategi utama, program utama, serta indikatornya, digambarkan sebagai berikut:

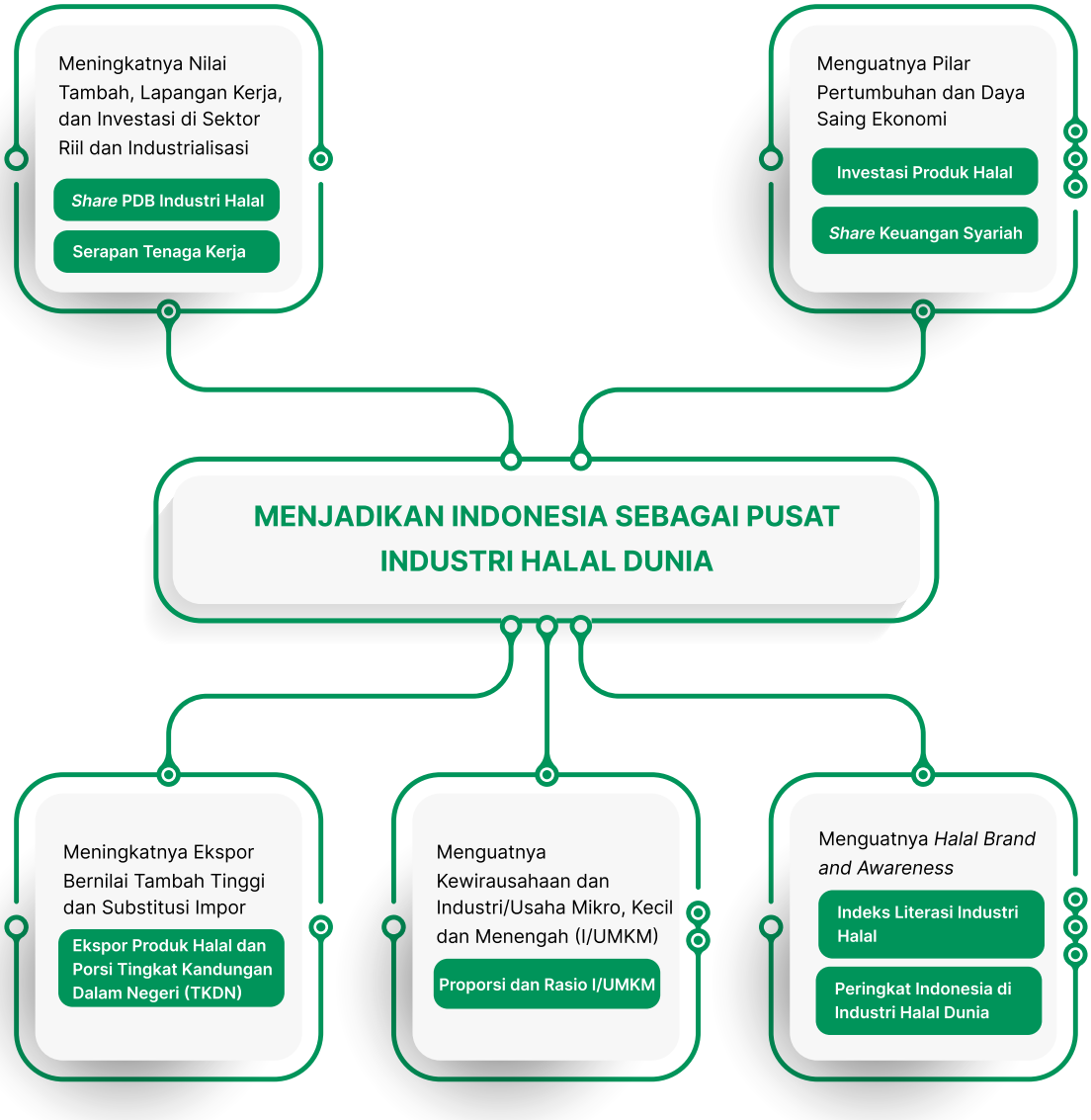

Gambar 2. Kerangka Visi, Target Pencapaian, Strategi Utama, Program Utama, dan Indikator pada *Master Plan* Industri Halal Indonesia

Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 mengusung *tagline*

"Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan"

STRATEGI UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL

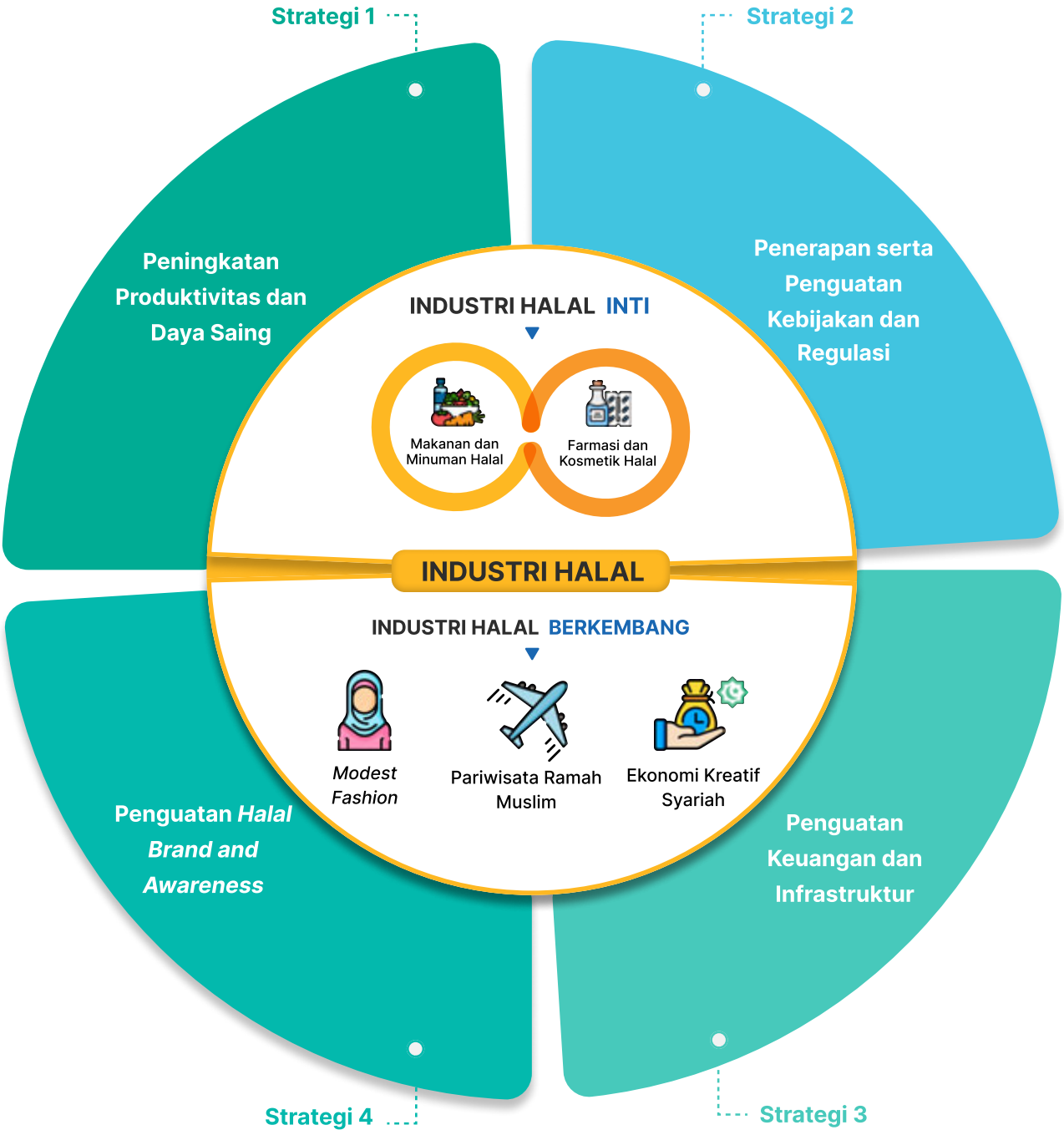

Gambar 8. Strategi Utama Pengembangan Industri Halal

Berikut adalah ruang lingkup dan cakupan dari industri halal inti, beserta strategi utama dan program utama dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri halal inti nasional.

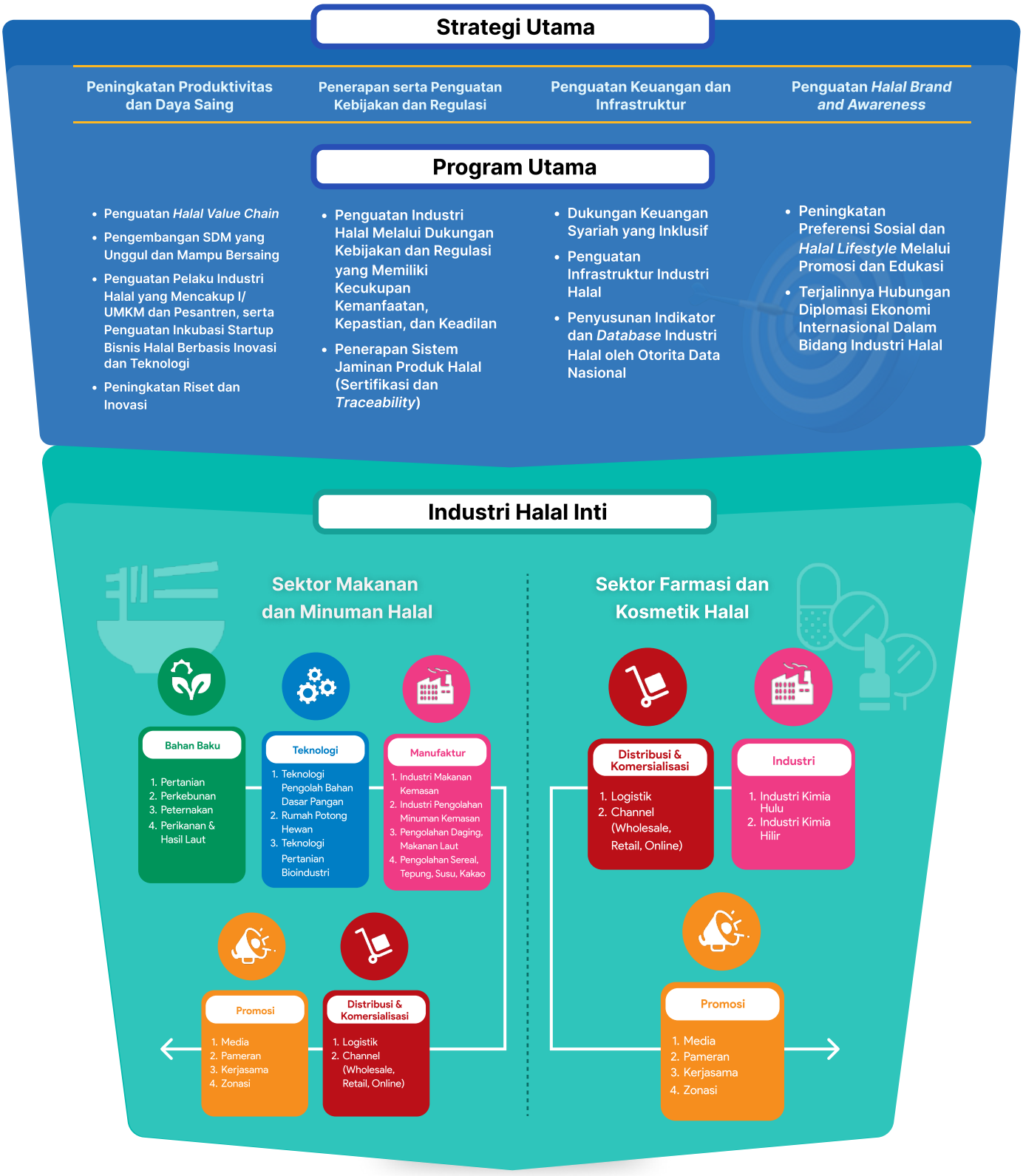

Gambar 12. Strategi Utama, Program Utama, dan Industri Halal Inti

Gambar 18. Strategi Utama dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia

Dengan keterkaitan ini, Kementerian/Lembaga dapat mengembangkan program-program dan menetapkan target spesifik untuk pengembangan industri halal dalam ruang-ruang yang sudah ada pada rencana pembangunan nasional yang sedang berjalan, maupun yang akan berkembang di masa mendatang. Dari sebelas Program Utama yang terdapat pada MPIHI 2023-2029 tersebut, ada tujuh ProP pengembangan strategis di bidang industri halal dalam rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan industri halal di Indonesia, yang telah tercantum di dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 (Gambar 24).

Rencananya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap pencapaian ProP tersebut, dan terbuka kemungkinan penyesuaian, perubahan, penambahan, ataupun pengurangan, pada program utama, sasaran, indikator, dan targetnya, menyesuaikan dengan situasi perkembangan pada tahun berjalan.

Proyek Prioritas Terkait Pengembangan Industri Halal Pada Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2023

Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP)

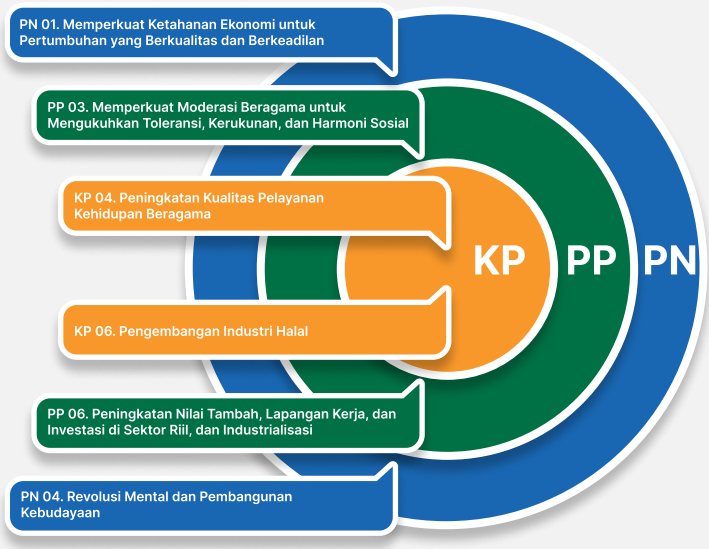

Proyek Prioritas (ProP)

01 Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Industri Halal

02 Penguatan Pelaku Industri Halal

03 Pengembangan Infrastruktur Industri Halal

04 Kerjasama Internasional Industri Halal

05 Pengembangan Pariwisata Halal

06 Penguatan *Halal Value Chain*

07 Penguatan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal

Gambar 24. Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas pada Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2023
Sumber : Peraturan Presiden No. 134 tahun 2022, tentang Pemutakhiran RKP 2023